

**TARGET CAPAIAN KINERJA (SPM) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab	
	Indikator	Komponen	Nilai		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
<b>Pemeliharaan Ketentraman &amp; Ketertiban Masyarakat</b>	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan	10	%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkada	10		

Putussibau, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691112 199010 1 001

**Perhitungan Biaya SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Kegiatan dan biaya					
			Langkah Kegiatan / Variabel / Komponen	Satuan	Volume	Rumus	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	A. Pengumpulan data				tidak ada kejadian	
			1. Jumlah warga	org	10			
			2. Identitas warga	berkas	10			
			B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar					
			1. Pelayanan kerugian materi					2,5 % dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan
			- rusak ringan	buah	5			
			- rusak sedang dan/ atau berat	buah	5			
			2. Pelayanan pengobatan					
			- Cidera ringan	org	10			
			- Cidera berat	org	10			

Putussibau, Januari 2020  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691112 199010 1 001

**CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM TANTRIBUM DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2019 (%)	GAP (%)	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM					
							2019 dan 2020			2021		
							TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN
1		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1	<b>Pemeliharaan Ketentraman &amp; Ketertiban Masyarakat</b>	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada			tidak ada kejadian		40%	Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	14.500.000	50%	Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	15.950.000
<b>JUMLAH</b>												

Putussibau, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691112 199010 1 001

## CAPAIAN KINERJA (SPM) URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Keterangan/ Permasalahan	
			Indikator	Komponen	Rumus		Nilai
1	2		3	4	5	6	
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Pemenuhan Standar Operasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan perkada	SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada	Ada atau Tidak SOP yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada	Ada	<a href="https://satpolpp.kapuas-hulukab.go.id/sop-pelayanan-pengaduan-pelanggaran-perda-dan-perkada/">https://satpolpp.kapuas-hulukab.go.id/sop-pelayanan-pengaduan-pelanggaran-perda-dan-perkada/</a>
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Pemenuhan Sarana Prasarana Satpol PP	Tersedianya Kendaraan Operasional	A Jumlah Kendaraan Operasi yang tersedia B Jumlah Pol PP yang melaksanakan Operasi	31 88 x100%	35%	
			Persentase Ketersediaan Perlengkapan Perorangan Pol PP	A Jumlah Perlengkapan perorangan yang tersedia B Jumlah Personil Pol PP	15 88 x100%	17%	
			Persentase Ketersediaan Perlengkapan Beregu	A Jumlah Perlengkapan beregu yang tersedia B Jumlah regu	0 3 x100%	0%	
			Tersedianya Perlengkapan Patroli	A Jumlah Perlengkapan Patroli yang dimiliki B Jumlah Perlengkapan yang seharusnya dimiliki	3 3 x100%	100%	Senter, Mobil dan HT
			Tersedianya Perlengkapan Penegakan Perka dan Perkada	A Jumlah Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada yang dimiliki B Jumlah Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada yang seharusnya dimiliki	1 4 x100%	25%	Tongkat T Mobil Dalmas, HT, Tongkat T dan Borgol
3	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat	Pemenuhan Standar Kualitas Anggota Satpol PP	Persentase Pejabat Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar	A Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar B Jumlah Pejabat Pol PP	1 14 x100%	7%	
			Persentase Pejabat Fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A Jumlah Pejabat Pol PP yang memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis B Jumlah Pejabat Pol PP	5 14 x100%	36%	Diklat PIM

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Keterangan/ Permasalahan
			Indikator	Komponen	Rumus	
1	2		3	4	5	6
			Persentase Pejabat PPNS Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	A Jumlah Pejabat PPNS Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis B Jumlah Pejabat PPNS Pol PP	0 x100% 0	0
4	Standar Pelayanan Masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Pemenuhan Kerugian Material	Persentase pemenuhan penanganan kerusakan ringan terhadap keseluruhan jumlah kerusakan ringan yang ditimbulkan	a Jumlah Kerusakan ringan yang memperoleh penggantian	0 x100%	0
				b Jumlah keseluruhan kerusakan ringan yang terjadi	0	
		Pemenuhan Pelayanan Pengobatan	Persentase pemenuhan penanganan kerusakan ringan terhadap keseluruhan jumlah kerusakan ringan yang ditimbulkan	a Jumlah Kerusakan ringan yang memperoleh penggantian	0 x100%	0
b Jumlah keseluruhan kerusakan ringan yang terjadi	0					
			Persentase Pemenuhan pelayanan pertolongan pertama terhadap keseluruhan jumlah cedera fisik yang ditimbulkan dari penegakan	a Jumlah cedera Fisik yang telah diberikan tindakan Pertolongan Pertama b Jumlah keseluruhan cedera fisik yang terjadi	0 x100% 0	0

Putussibau, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

**RUPINUS, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691112 199010 1 001

**PERHITUNGAN BIAYA SPM URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN**

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu	Indikator	Kegiatan dan biaya						
				Langkah Kegiatan	Komponen	Satuan	Nilai	Rumus	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Pemenuhan Standar Operasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan perkada	Penyusunan / Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur	A Honor Tim B Biaya Rapat C Biaya Sosialisasi	Paket Paket Paket	11.400.000 4.500.000 15.000.000	30.900.000	Honor Snack Nasi Kotak & Snack	
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	ketersediaan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional	A Harga Kendaraan	Rupiah	400.000.000	800.000.001	Mobil Dalmas	
					B Jumlah Kendaraan	Unit	1			
					C Biaya Administrasi	Rupiah	400.000.000			
				Ketersediaan Perlengkapan Operasional	Pengadaan Perlengkapan Perorangan	A Harga Alat Perlengkapan Perorangan Per Paket	Rupiah	1.000.000	0	
						B Jumlah Sasaran	Orang	0		
						C Biaya Administrasi	Rupiah	0		
			Pengadaan Perlengkapan Beregu		A Harga Alat Perlengkapan Beregu Per Paket	Rupiah	1.000.000	5000000	Senter, HT dan Tongkat T	
					B Jumlah Sasaran	Orang	4			
					C Biaya Administrasi	Rupiah	1.000.000			
			Pengadaan Perlengkapan Patroli	A Harga Alat Perlengkapan Patroli Per Paket	Rupiah	300.000.000	0			
				B Jumlah Sasaran	Paket	0				
				C Biaya Administrasi	Rupiah	0				
				Pengadaan Perlengkapan Penegakan Perka dan Perkada	A Harga Alat Perlengkapan Penegakan Perka dan Perkada Per Paket B Jumlah Sasaran C Biaya Administrasi	Rupiah Paket Rupiah	500.000.000 1 500.000.000	1000000000	Mobil Dalmas, HT dan Borgol	

No	Mutu Pelayanan Dasar	Cakupan Mutu	Indikator	Kegiatan dan biaya					
				Langkah Kegiatan	Komponen	Satuan	Nilai	Rumus	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota	Pemenuhan Standar Kualitas Anggota Satpol PP	Pejabat Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar	Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Dasar	A Biaya Pendidikan	Paket	6.250.000	62500000	
					B Jumlah Sasaran	Orang	10		
			Pejabat Fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Pemberian Pendidikan Teknis	A Biaya Pendidikan	Paket	8.265.000	82650000	
					B Jumlah Sasaran	Orang	10		
Pejabat PPNS yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendidikan Teknis	A Biaya Pendidikan	Paket	13.621.000	27242000				
		B Jumlah Sasaran	Orang	2					
Pejabat Fungsional Pol PP yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	A Biaya Pendidikan	Paket	8.265.000	82650000				
		B Jumlah Sasaran	Orang	10					
4	Standar Pelayanan Masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat Penegakan Hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Pemenuhan Kerugian Material	penanganan kerusakan ringan yang di derita Masyarakat	Perbaikan kerusakan ringan barang atau aset pribadi Masyarakat	A Biaya Proses Taksir Kerusakan	Rupiah	200.000	2.700.000	
					B Harga Taksiran Kerusakan	Rupiah	500.000		
					C Volume Kerusakan yang terjadi	Kerusakan	5		
			penanganan kerusakan Berat yang di derita Masyarakat	Perbaikan kerusakan ringan barang atau aset pribadi Masyarakat	A Biaya Proses Taksir Kerusakan	Rupiah	200.000	5.200.000	
				B Harga Taksiran Kerusakan	Rupiah	1.000.000			
				C Volume Kerusakan yang terjadi	Kerusakan	5			
	Pemenuhan Pelayanan Pengobatan	Pelayanan Pertolongan Pertama	A Biaya Pengobatan	Rupiah	200.000	200.010			
		Persentase Pemenuhan pelayanan pertolongan pertama terhadap keseluruhan jumlah cedera fisik yang ditimbulkan dari penegakan	B Jumlah Masyarakat yang menderita Cidera akibat Penegakan Perda	Orang	10				